

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH WISATAWAN
NUSANTARA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

SKRIPSI

**HAIQAL IMANSYAH
NIM : 18622016**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH WISATAWAN
NUSANTARA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**Nama : HAIQAL IMANSYAH
NIM : 18622016**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH
PENDUDUK, DAN JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : HAIQAL IMANSYAH
NIM : 18622016

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016 / Lektor

M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak, CPFRA
NIDN. 1025129302 / Lektor

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA., CPFRA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul
PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH
PENDUDUK, DAN JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : HAIQAL IMANSYAH
NIM : 18622016

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tujuh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
NIDK. 8833900016 / Lektor

Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Anggota

Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak., CPFRA
NIDK. 8854290019 / Lektor

Tanjungpinang, 27 Desember 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Haiqal Imansyah
NIM : 18622016
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.46
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto,
Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan
Nusantara Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 27 Desember 2023
Penyusun,

HAIQAL IMANSYAH
NIM : 18622016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih ya Allah atas berkat rahmat-Mu
aku dapat menuntaskan skripsi ini dengan lancar
meskipun terdapat kelemahan.

Terimakasih banyak telah memberikanku lingkungan yang baik dan
orang-orang yang baik sehingga aku selalu bersemangat untuk menuntaskan
skripsi ini.

Ibuku yang kucintai

Dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga, saya
ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu tercinta. Ibu,
engkau adalah sosok yang tiada henti memberikan dukungan, inspirasi, dan
kasih sayang selama perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini.

Bestfriend

Dengan penuh rasa terima kasih dan kebahagiaan yang mendalam, saya ingin
menyampaikan penghargaan kepada teman-teman terbaikku. Dalam perjalanan
menyelesaikan skripsi ini, kehadiran dan dukungan kalian menjadi pilar utama
yang mampu mengangkat semangat dan memberikan kekuatan tambahan.

HALAMAN MOTTO

*“Setiap orang yang kita temui adalah guru,
setiap tempat yang kita datangi adalah kelas,
dan setiap kejadian yang kita alami adalah pelajaran.”*

- Guru Gembul

*“It's okay to celebrate success,
but it's more important to heed
the lessons of failure.”*

- Bill Gates

*“Jangan kenali kebenaran
berdasarkan individu-individu
kenalilah kebenaran itu sendiri
otomatis kau akan kenal
siapa dipihak yang benar”*

- Guru Gembul

~ kenalilah dirimu ~

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E. M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak., CPFRA. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tak pernah lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Seluruh anggota keluargaku yang terus memberi dukungan mereka kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 27 Desember 2023
Penulis,

HAIQAL IMANSYAH
NIM : 18622016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kegunaan Penelitian	12
1.5.1 Kegunaan Praktis	12
1.5.2 Kegunaan Teoritis	12
1.6 Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan	14
2.1.2 Otonomi Daerah.....	15
2.1.3 Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.....	15
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	23

2.1.6	Penduduk	28
2.1.7	Wisatawan.....	31
2.2	Hubungan Antar Variabel	34
2.2.1	Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah	34
2.2.2	Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah	36
2.2.3	Hubungan Jumlah Wisatawan Nusantara dengan Pendapatan Asli Daerah	36
2.2.4	Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Jumlah Penduduk	37
2.2.5	Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Jumlah Wisatawan Nusantara	37
2.2.6	Hubungan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Wisatawan Nusantara	38
2.3	Kerangka Pemikiran	38
2.4	Hipotesis.....	39
2.4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah	39
2.4.2	Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah.....	39
2.4.3	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Pendapatan Asli Daerah	40
2.4.4	Produk Domesik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan Nusantara dan Pendapatan Asli Daerah.	40
2.5	Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Jenis Data	42
3.3	Teknik Pengumpulan Data	43
3.4	Populasi dan Sampel	43
3.4.1	Populasi	43
3.4.2	Sampel	44
3.5	Definisi Operasional Variabel	44
3.6	Teknik Pengelolaan Data	45
3.7	Teknik Analisis Data	45

3.7.1	Metode Analisis Data	45
3.7.1.1	Analisis Regresi Data Panel	45
3.7.1.2	Model Regresi Data Panel	47
3.7.2	Uji Pemilihan Model	49
3.7.2.1	Uji Chow	49
3.7.2.2	Uji Hausman	49
3.7.2.3	Uji Lagrange Multiplier (LM)	50
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	50
3.7.3.1	Uji Normalitas	50
3.7.3.2	Uji Heteroskedastisitas	51
3.7.3.3	Uji Autokorelasi	52
3.7.3.4	Uji Multikolinearitas	52
3.7.4	Uji Hipotesis	53
3.7.4.1	Uji Parsial (<i>T-test</i>)	53
3.7.4.2	Uji Simultan (Uji F)	53
3.7.4.3	Koefisien Determinasi (Nilai R^2)	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Hasil Penelitian	55
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.1.2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	61
4.1.3	Analisis Hasil Penelitian	63
4.1.3.1	Hasil Uji Pemilihan Model	63
4.1.3.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	65
4.1.3.2.1	Uji Normalitas	65
4.1.3.2.2	Uji Multikolinearitas	66
4.1.3.3	Analisis Regresi Data Panel	67
4.1.3.4	Hasil Uji Hipotesis	69
4.1.3.4.1	Uji t	69
4.1.3.4.2	Uji F	70
4.1.3.4.3	Koefisien Determinasi	70
4.2	Pembahasan	71

4.2.1 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75
4.2.2 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	79
4.2.3 Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan Nusantara Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	83
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pemerintah Daerah Provinsi yang Berstatus Mandiri.....	2
Tabel 2. 1	Indikator Kemandirian Fiskal	17
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4. 1	Sektor Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	60
Tabel 4. 2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	61
Tabel 4. 3	Hasil Uji Chow	63
Tabel 4. 4	Hasil Uji Hausman	64
Tabel 4. 5	Hasil Uji Lagrange Multiplier	64
Tabel 4. 6	Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4. 7	Hasil Uji Regresi	67
Tabel 4. 8	Hasil Uji t.....	69
Tabel 4. 9	Hasil Uji f.....	70
Tabel 4. 10	Koefisien Determinasi	70
Tabel 4. 11	Data Penelitian	71
Tabel 4. 12	Profil Singkat Pariwisata di Provinsi Aceh 2022	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 PDRB DKI Jakarta.....	3
Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Jawa Barat	5
Gambar 1. 3 Jumlah Wisatawan Nusantara Kabupaten Badung	6
Gambar 1. 4 Provinsi dengan Kemandirian Fiskal Terendah 2020.....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4. 1 Uji Normalitas	66
Gambar 4. 2 Persentase Jenis PAD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Penelitian
- Lampiran 2 : Data Penelitian Setelah Transformasi LN
- Lampiran 3 : Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi
- Lampiran 4 : Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota
- Lampiran 5 : PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- Lampiran 6 : PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- Lampiran 7 : Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- Lampiran 8 : Jumlah Wisatawan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
- Lampiran 9 : Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah) di Provinsi Aceh
- Lampiran 10 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2021 dan 2022
- Lampiran 11 : Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Provinsi Aceh, 2022
- Lampiran 12 : Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Provinsi Aceh, 2022
- Lampiran 13 : Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Bintang Menurut Bulan (hari) di Aceh, 2022
- Lampiran 14 : Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel NonBintang Menurut Bulan (hari) di Aceh, 2022
- Lampiran 15 : Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Aceh, 2022
- Lampiran 16 : Output Eviews
- Lampiran 17 : Persentase Plagiasi

ABSTRAK

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Haiqal Imansyah. 18622016. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
haiqalcs88@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara. Total sampel adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian, dengan data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat melalui publikasi dan *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Hasil penelitian membuktikan secara parsial pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan nusantara. Hal ini terbukti pada uji parsial, nilai signifikansi semua variabel independen berada kurang dari 0,05. Akan tetapi, pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara, terlihat pada uji simultan dengan nilai *f*-hitung yang lebih besar dari *f*-tabel.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh secara parsial tidak dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan nusantara. Tetapi secara simultan PAD dapat dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dianggap masih kurang dapat memanfaatkan sumber daya daerahnya dengan baik di sektor ekonomi, demografi, dan pariwisata.

Kata Kunci: PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan Nusantara, PAD.

Dosen Pembimbing 1: Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2: M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak., CPFRA

ABSTRACT

INFLUENCE OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT, NUMBER OF POPULATION, AND NUMBER OF NUSANTARA TOURISTS ON REGIONAL ORIGINAL INCOME

Haiqal Imansyah. 18622016. *Accountancy*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
haiqalcs88@gmail.com

The aim of this research is to find out whether the original income of districts/cities in Aceh Province is influenced by GRDP, population and number of domestic tourists. The total sample is 23 regencies/cities in Aceh Province.

Quantitative methods are used as research methods, with the data used being secondary data obtained through publications and the official website of the Indonesian Central Statistics Agency, the Directorate General of Financial Balance, and Information and Documentation Management Officials.

The research results partially prove that regional original income is not influenced by GRDP, population and number of domestic tourists. This was proven in the partial test, the significance value of all independent variables was less than 0.05. However, regional original income is jointly (simultaneously) influenced by GRDP, population and number of domestic tourists, as can be seen in the simultaneous test with an f-count value that is greater than the f-table.

Based on the research results, the conclusion that can be drawn is that local revenue in the District/City of Aceh Province is not partially influenced by GRDP, population and number of domestic tourists. But simultaneously PAD can be influenced by GRDP, population and number of domestic tourists. So that districts/cities in Aceh Province are considered to be unable to utilize their regional resources properly in the economic, demographic and tourism sectors.

Keywords: *GRDP, Population, Number of Indonesian Tourists, Regional Income.*

Lecture Adviser 1: Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Lecture Adviser 2: M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak., CPFRA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi awal mula implementasi otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan gagasan otonomi daerah, beberapa urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dianggap lebih mampu memahami kebutuhan daerahnya masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Tujuan dari pengalihan kekuasaan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan membentuk kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, yang akan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan agar dapat menjalankan berbagai kegiatan operasional pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mengartikan pendapatan asli daerah sebagai semua pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah dalam bentuk kas yang menambah kekayaan bersih suatu daerah. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah tahun 2020 yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh langsung terhadap kemandirian fiskal. Kemampuan pemanfaatan PAD sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan prioritas pembangunan masyarakat dan daerah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas daerah dalam menghasilkan PAD, begitu pula dengan tingkat kemandirian fiskal daerah.

Tabel 1. 1
Pemerintah Daerah Provinsi yang Berstatus Mandiri

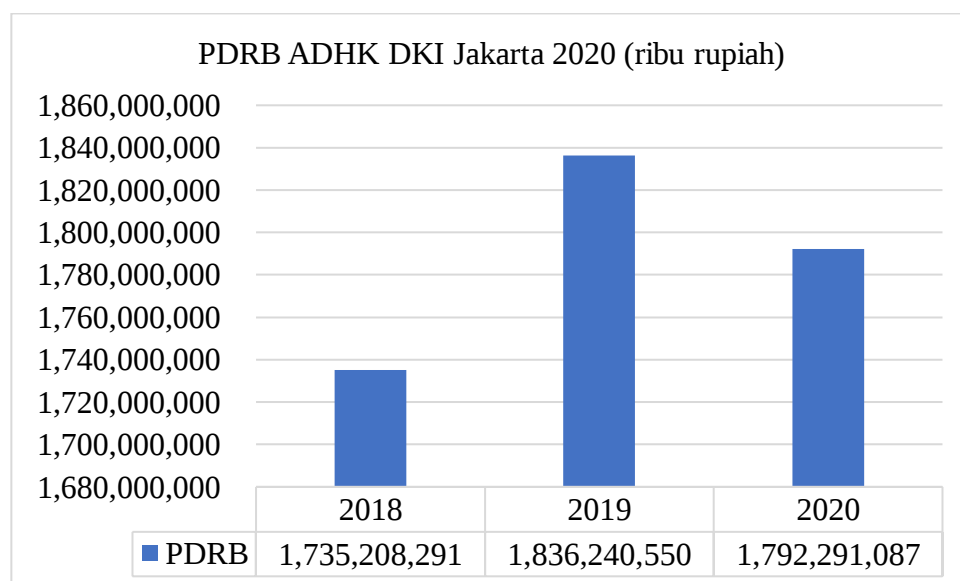
No	Nama Entitas	2016	2017	2018	2019	2020
1	DKI Jakarta	0,6816	0,6669	0,6681	0,7106	0,636
2	Jawa Timur	0,6337	0,5794	0,5802	0,5767	0,567
3	Jawa Tengah	0,5879	0,5294	0,5551	0,5583	0,538
4	Bali	0,5794	0,5672	0,5941	0,6054	0,536
5	Banten	0,6311	0,5931	0,6133	0,6269	0,529
6	Kalimantan Timur	0,5046	0,5625	0,5436	0,5568	0,522
7	Jawa Barat	0,6154	0,5622	0,5791	0,5895	0,514

Sumber: Laporan Reviu atas Kemandirian Fiskal (BPK, 2021)

Laporan Reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa 10 pemerintah daerah provinsi masih berstatus Belum Mandiri (30,30%), 16 pemerintah daerah provinsi berstatus Menuju Kemandirian (48,49%), dan hanya 7 pemerintah daerah provinsi yang berstatus Mandiri (21,21%). Lebih lanjut dalam laporan dijelaskan bahwa 23 pemerintah provinsi (dari 33 provinsi atau 69,70%) memiliki tren kemandirian fiskal yang datar atau tidak mengalami perubahan status, bahkan diketahui dari 503 pemerintah daerah (kota, kabupaten, dan provinsi) yang dianalisis diketahui 468 (dari 503 pemerintah daerah atau 93,04%) mengalami tren datar atau tidak adanya

perubahan status sejak 2013 hingga 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung dari bantuan luar (pemerintah pusat) dan tidak adanya kemajuan atas kemandirian fiskal di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa PAD pada pemerintah daerah masih kecil atau tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional daerahnya sehingga bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal, seharusnya daerah melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan yang dibuat secara terbuka dan akuntabel untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar-besarnya.

Gambar 1. 1
PDRB DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Indeks Kemandirian Fiskal tertinggi se-Provinsi Indonesia diperoleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,6365 (diatas 0,50) atau berstatus mandiri. Hal ini terlihat pada pendapatan asli daerahnya yang menjadi tertinggi di Indonesia yaitu sebesar Rp57 triliun, besarnya pendapatan ini diduga tak lepas dari besarnya

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tergambarkan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp1,792 triliun rupiah, menjadi tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 walaupun angka ini menurun dari periode sebelumnya, hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi suatu pandemi yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

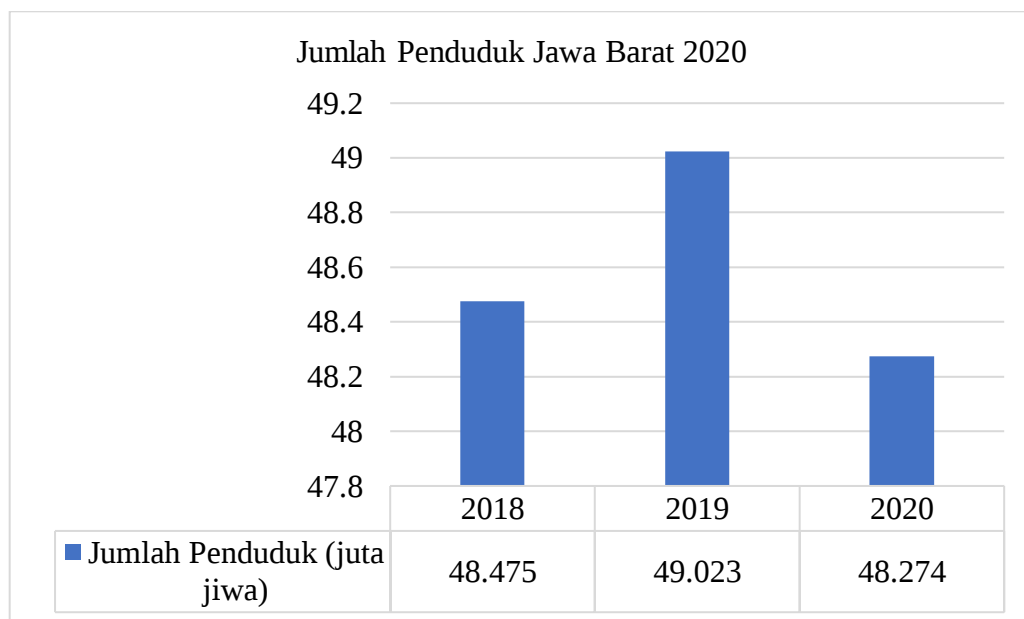
Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat memberikan gambaran terhadap kondisi perekonomian di suatu daerah. Daerah yang memiliki sektor ekonomi yang kuat dan berkembang, seperti sektor industri atau pariwisata, cenderung memiliki PAD yang tinggi. Jika PDRB didominasi oleh sektor yang menghasilkan pendapatan yang tinggi, daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang lebih besar untuk dikumpulkan sebagai pendapatan asli daerah (Hutasoit, 2017).

Berdasarkan penelitian Susanto (2014) juga menyatakan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD. PDRB digunakan sebagai indikator dari kondisi ekonomi suatu daerah. Membaiknya ekonomi suatu daerah akan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membayar kewajiban, mengembangkan diri dan melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

Akan tetapi dalam penelitian Eni Erviana (2018) diketahui juga bahwa PDRB bisa berpengaruh negatif terhadap PAD, diduga dikarenakan kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD yang menurun di daerah penelitiannya dengan nilai PDRB yang selalu meningkat tiap tahunnya. Lebih lanjut dalam penelitian Juwita (2022), menyatakan pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terlihat masih ada inkonsistensi tentang pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap PAD, beberapa penelitian mengatakan bahwa ada pengaruh PDRB terhadap pendapat tetapi ada juga yang mengatakan tidak adanya pengaruh.

Gambar 1. 2
Jumlah Penduduk Jawa Barat



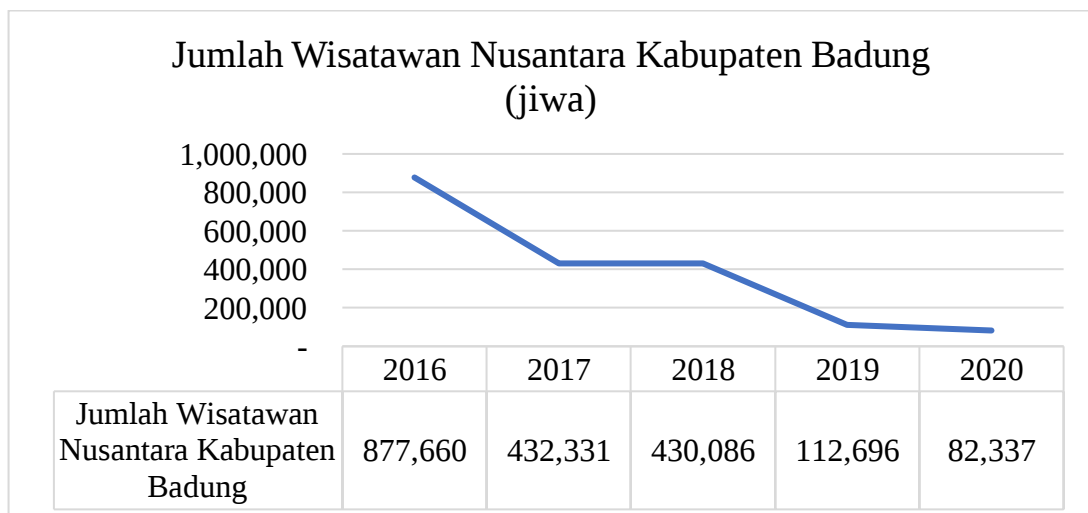
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Jawa Barat yang juga berstatus mandiri diketahui memiliki potensi yang lebih unggul dari daerah lain. Yaitu sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduknya sebesar 48,274 juta jiwa pada 2020 (Badan Pusat Statistik, 2023). Penduduk sangat berkaitan dengan PDRB, yaitu sebagai penggerak dari semua sektor PDRB. Semakin tinggi jumlah penduduk yang produktif maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa serta terciptanya peluang usaha yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membantu mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Penduduk sangat berperan

bagi pembangunan suatu daerah (Asmuruf, Makdalena F Rumat & Kawung, 2015).

Dalam penelitian Patriansyah (2018) menyatakan jumlah penduduk yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dalam hal seperti ini, pendapatan pemerintah daerah dapat meningkat jika pertumbuhan penduduk diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Selain itu, hasil penelitian Susanto (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya, hasil penelitian Batik (2013) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah atau jumlah penduduk tidak memengaruhi tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah. Ini diduga disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk di daerah penelitian tidak produktif sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerahnya.

Gambar 1. 3
Jumlah Wisatawan Nusantara Kabupaten Badung



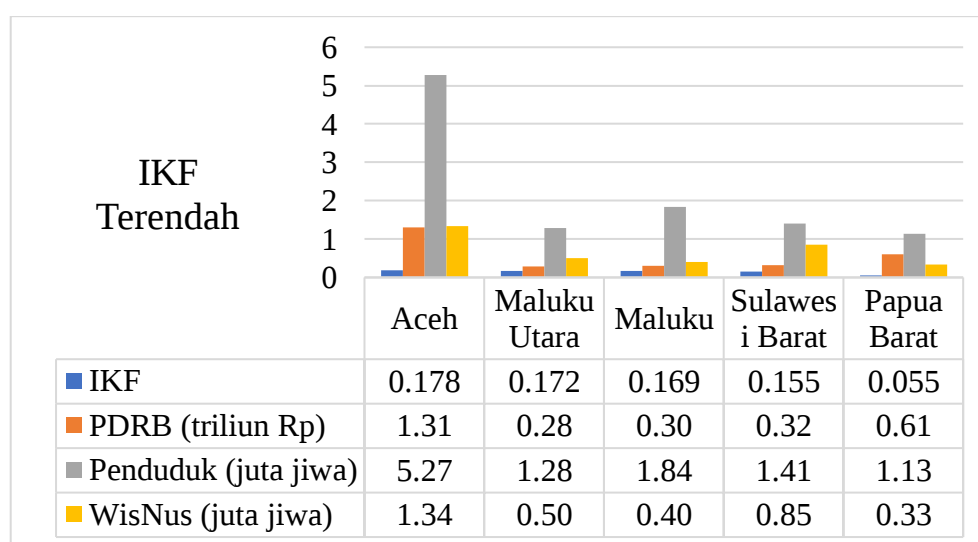
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Kabupaten Bandung merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang berstatus sangat mandiri dari 2013-2019, tetapi turun menjadi status mandiri pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena menurunnya pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung yaitu pada pajak hotel dan pajak restoran imbas dari munculnya pandemi *Covid-19* dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi kegiatan pariwisata atau terjadi penurunan jumlah wisatawan di wilayahnya. Dibuktikan dengan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung yang mempublikasikan data terkait Kunjungan Wisatawan Nusantara. Total kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2018 berjumlah 430.086 jiwa, menurun di 2019 menjadi 112.696 jiwa hingga 2020 berjumlah 82.337 jiwa atau menurun sebesar 81% sejak 2018, pada tahun 2020 PAD Kabupaten Bandung sebesar 2,116 triliun menurun 43,76% dibandingkan tahun sebelumnya (2019) sebesar 4,835 triliun.

Berdasarkan penelitian Utami & Kafabih (2021), industri pariwisata dan industri terkait lainnya mengalami peningkatan aktivitas ekonomi ketika jumlah wisatawan domestik meningkat. Wisatawan domestik mengeluarkan uang untuk penginapan, makan, belanja, transportasi, dan layanan terkait pariwisata lainnya, yang menghasilkan uang bagi perusahaan-perusahaan terdekat. Melalui pajak kamar hotel, pajak restoran, pajak objek wisata, biaya tiket masuk, biaya parkir dan pungutan lainnya. Peningkatan pendapatan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pariwisata dalam negeri akan mengakibatkan penerimaan pajak dan retribusi yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut penelitian Wadjaudje dkk., (2018), kuantitas pengunjung domestik memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Namun hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Yanti dkk., (2021) yang menunjukkan bahwa pariwisata dalam negeri tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengunjung domestik ke wilayah penelitian datang untuk keperluan kerja, sehingga mereka tidak mengeluarkan uang terlalu banyak dan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Gambar 1. 4
Provinsi dengan Kemandirian Fiskal Terendah 2020



Sumber: BPS dan BPK

Lebih lanjut dalam laporan kemandirian fiskal, diketahui 5 provinsi yang memiliki IKF terendah yaitu Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dari kelima provinsi itu, dapat dilihat, dimana mulai dari nilai PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara Provinsi Aceh memiliki nilai yang cukup besar ketimbang 4 provinsi lainnya, akan tetapi memiliki status kemandirian fiskal dibawah 0,25 atau belum mandiri. Lebih rinci lagi diketahui rata-rata IKF Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh kurang dari 0,2, yang

berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih belum mandiri dalam membiayai urusan pemerintahannya atau masih bergantung oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya.

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Hal ini ditunjukkan dari nilai PDRB-nya yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan PDRB tertinggi ada di Kabupaten Aceh Utara yang didominasi oleh sektor pertanian. Kenaikan atau pertumbuhan perekonomian ini akan berpotensi meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Juliansyah (2018) kapasitas seseorang untuk memenuhi beberapa kebutuhan keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan pendapatannya, dengan kata lain peningkatan produk domestik regional bruto dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh menempati urutan ke-6 sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau sumatera yaitu sebesar 5,2 juta jiwa (2020) dengan rata-rata jumlah penduduk tiap-tiap Kabupaten/Kota sebesar 200 ribu jiwa (2020) dan diproyeksikan mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Aceh Utara, besarnya penduduk Kabupaten Aceh Utara ini dibarengi dengan nilai produk domestik regional bruto yang tinggi atau menjadi tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Menurut Susanto (2014), semakin tinggi jumlah penduduk yang produktif maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa serta terciptanya peluang usaha yang akan berimbas pada peningkatan PDRB.

Selain itu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki potensi pariwisata yang signifikan, didukung oleh sejarah Kesultanan Aceh yang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Situs-situs bersejarah dapat ditemukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota-nya. Daerah dengan jumlah wisatawan terbesar pada tahun 2020 adalah Aceh Utara mencapai 488 ribu wisatawan yang sebagian besar merupakan wisatawan nusantara, Aceh Utara terkenal keindahan alamnya dan wisata religi, salah satu lokasi yang terkenal adalah gunung Salak dan makam Cut Meutia sebagai salah satu pahlawan nasional. Kota Sabang juga merupakan daerah yang menawarkan wisata bahari dikarenakan lokasi daerahnya yang merupakan daerah kepulauan yaitu kepulauan weh, kunjungan wisatawan mancanegara terbesar ada pada kota ini yaitu sebesar 2.363 wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2022. Kemudian ada Kota Banda Aceh dengan Masjid Raya Baiturrahman menjadi salah satu masjid tertua peninggalan Kesultanan Aceh. Berdasarkan laporan kunjungan dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada rentang tahun 2020-2023, wisatawan nusantara merupakan wisatawan terbesar yang melakukan kunjungan di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Dengan melihat keunggulan dan potensi yang dimiliki daerah-daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat memperoleh pendapatan asli daerah hingga dapat menciptakan kemandirian fiskal di daerahnya, kemudian karena masih adanya inkonsistensi dalam beberapa penelitian terdahulu dan keanehan akan status kemandirian fiskal Provinsi Aceh yang berstatus belum mandiri, padahal memiliki berbagai kelebihan dari sektor PDRB, penduduk, dan wisatawan nusantara

membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau fenomena diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Jumlah Wisatawan Nusantara berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara secara simultan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan batasan sebagai berikut:

1. Data penelitian yang digunakan merupakan data tahunan pada periode 2020-2022;
2. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Untuk mengetahui bagaimana Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara secara simultan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan informasi penting kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara terhadap PAD. Agar pemerintah dapat mengarahkan sumber daya dan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan PAD.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Sebagai kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam sekolah tinggi, serta memperluas wawasan peneliti maupun peneliti selanjutnya. Serta memberikan pemahaman lebih dalam terhadap konsep-konsep tertentu yang dapat memberikan kontribusi berharga terhadap literatur ilmiah dan pemahaman umum dalam suatu bidang studi.

1.6 Sistematika Penelitian

Agar fokus penelitian terarah pada permasalahan yang ingin dibahas, maka dibuatlah sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan teori, hubungan antar variable, kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dengan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif variabel penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling awalnya mengemukakan teori keagenan pada tahun 1976. Jensen mengklarifikasi bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan tugas tertentu dan kemudian memberi mereka kemampuan untuk mengambil keputusan. Dalam kerangka teori keagenan, fungsinya adalah untuk memungkinkan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen, mengelola urusan mereka sendiri bebas dari intervensi pemerintah pusat, sedangkan pemerintah pusat mengambil posisi sebagai prinsipal (Hamdani, 2016).

Oleh sebab itu hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini adalah sebagai teori yang dapat menjelaskan munculnya fenomena yang ingin diteliti yaitu adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat (*principal*) menyerahkan otoritas kepada pemerintah daerah (*agency*), dimana otoritas tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusannya dan memanfaatkan sumber daya lokal kemudian terlihat dengan adanya otoritas tersebut, dan akan berdampak pada sumber pendapatan utama. Adanya sumber utama pendapatan pemerintah daerah dapat meningkatkan aspek keuangan untuk memaksimalkan infrastruktur dan layanan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat mencapai kemandirian daerah. Hal ini juga dapat menjelaskan adanya wakil rakyat (*agency*) yang dipilih oleh rakyat (*principal*) untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Daerah otonom adalah entitas hukum yang tergabung dalam suatu wilayah, memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang didasarkan pada inisiatif sendiri dan aspirasi masyarakat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Dapat dikatakan daerah otonom sebagai suatu daerah yang terbentuk dari kesatuan masyarakat yang diberikan otonomi daerah atau hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI (2020) dalam Laporan Reviu atas Kemandirian Fiskal Daerah, kemandirian fiskal adalah suatu indikator yang dapat menunjukkan dan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program pemerintah daerah, tanpa bergantung dari luar atau pemerintah pusat.

Dapat dipahami bahwa kemandirian fiskal sebagai suatu indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa bergantung dari pihak luar atau pemerintah pusat. Kemandirian

fiskal dapat menunjukkan ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Metode yang digunakan dalam mengukur kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yaitu formula yang dikembangkan Hunter (1977). Formula ini kemudian disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia. Menurut BPK formulanya sebagai berikut:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP+TrSP+B+REVSH}{REVOR+TrGP+TrSP+B+REVSH}$$

Keterangan :

- IKF : Indeks Kemandirian Fiskal;
- REV_{OR} : Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Tr_{GP} : *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
- Tr_{SP} : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik)
- B : *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)
- REV_{SH} : Dana Bagi Hasil yang terdiri dari :
- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21;
 - c. DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. DBH sumber daya alam.

Nilai yang dihasilkan akan dibandingkan dengan klasifikasi “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri” seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Indikator Kemandirian Fiskal

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju Kemandirian
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: BPK, Reviu Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2020.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Idris (2016), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua jenis pendapatan kas yang diperoleh daerah sehingga menambah angka kekayaan bersih pada suatu periode waktu tertentu dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan atau dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian Fatimah dkk (2020), pendapatan asli daerah (PAD) diartikan sebagai perwakilan dari pendapatan yang telah diperoleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diartikan sebagai setiap uang tunai yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap kekayaan bersih daerah untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak wajib dikembalikan. Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi, pendapatan tersendiri dari pengelolaan sumber daya daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proporsi pendapatan asli suatu daerah terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) menunjukkan kemampuan atau tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah federal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah, yang memberikan daerah kekuasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Pendapatan atau hasil daerah akan dipergunakan untuk mendanai program-program atau kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memenuhi kebutuhan dan/atau pengeluaran daerah. Keterkaitan antara belanja daerah dengan pendapatan harus positif, semakin kuat kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan maka alokasi belanja daerahnya pun semakin tinggi (Fatimah dkk 2020).

Untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dibutuhkan kompetensi dari pemerintah serta masyarakat yang berkemauan untuk dapat mencari atau mendeteksi keunggulan yang dimiliki daerahnya, sehingga menjadi nilai jual yang kompetitif untuk dapat bersaing dalam ekonomi serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan melalui program-program dan kebijakan yang pro terhadap rakyat (Horota, 2017).

Yang termasuk pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak adalah kewajiban untuk berkontribusi kepada daerah yang terutang oleh pihak pribadi ataupun badan dengan sifatnya yang memaksa sesuai dengan undang-undang serta tidak adanya imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk mensejahterakan rakyat. Sebaiknya pemungutan pajak daerah tidak menimbulkan biaya untuk pemungutan pajak yang lebih besar daripada penerimaan pajak yang didapatkan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang termasuk pajak daerah adalah:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) Pajak hotel
 - 2) Pajak restoran
 - 3) Pajak hiburan
 - 4) Pajak reklame
 - 5) Pajak penerangan jalan
 - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan

- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021, retribusi daerah adalah pelayanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan objek dan klasifikasi-klasifikasi retribusi daerah sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 2) Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan;
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 9) Retribusi pergantian biaya cetak peta;
- 10) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;

- 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- 14) Retribusi pengendalian.

b. Retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan;
- 3) Retribusi tempat pelelangan;
- 4) Retribusi terminal;
- 5) Retribusi tempat khusus parkir;
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- 7) Retribusi rumah potong hewan;
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 10) Retribusi penyeberangan di air; dan
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya daerah yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rafi dkk, 2022). Laba yang diperoleh dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Yang dikatakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat adanya penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat adanya penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Jumlah nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah domestik suatu daerah sebagai hasil kegiatan perekonomian selama jangka waktu tertentu, tanpa memperhitungkan unsur-unsur produksi yang dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk, disebut dengan produk domestik regional bruto, atau PDRB (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Arizal & Marwan (2019), produk domestik regional bruto adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan sebagai hasil dari aktivitas ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhitungkan asal usul atau kepemilikan faktor produksi yang digunakan oleh penduduk setempat. Ini mencerminkan hasil ekonomi dari wilayah tersebut.

Menurut Ria dkk (2022), yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh seluruh elemen perekonomian suatu wilayah, atau sebaliknya menggambarkan total nilai tambah yang diperoleh unit-unit usaha yang berada di suatu wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini, produk domestik regional bruto didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto dari seluruh produk, jasa, dan unit usaha yang diproduksi

di suatu wilayah domestik selama periode waktu tertentu. Kepemilikan faktor-faktor produksi baik milik penduduk lokal maupun non-residen tidak dipertimbangkan dalam penjelasan ini. Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan output dalam jangka waktu tertentu dapat dilihat dari nilai PDRB yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian di daerah tersebut.

Dalam *website* resmi Badan Pusat Statistik, ada 3 pendekatan yang dilakukan untuk menyusun produk domestik regional bruto yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah atau wilayah suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun, diakumulasikan untuk membentuk produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat tujuh belas kelompok lapangan usaha atau sektor yang termasuk dalam unit-unit produksi tersebut.:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian,
- c. Industri Pengolahan,
- d. Pengadaan Listrik dan Gas;
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- f. Konstruksi;
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- h. Transportasi dan Pergudangan;
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

- j. Informasi dan Komunikasi;
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- l. Real Estate;
- m. Jasa Perusahaan;
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- o. Jasa Pendidikan;
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
- q. Jasa Lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasinya yang berjudul “PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022”, rumus yang digunakan dalam pendekatan ini adalah:

$$Y = NTB1 + NTB2 + \dots$$

Keterangan:

Y : Pendapatan

NTB : Nilai tambah yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Total imbalan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Imbalan jasa ini mencakup:

- a. Upah dan Gaji
- b. Sewa Tanah
- c. Bunga Modal

d. Keuntungan

Semua itu sebelum pajak penghasilan dan pajak langsung lain diterapkan. Pada pendekatan ini produk domestik regional bruto juga berisi penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tidak langsung yang nilainya sudah dikurangkan subsidi.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasinya yang berjudul “PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022”, rumus yang digunakan dalam pendekatan ini adalah:

$$Y = \hat{r} + \hat{w} + \hat{i} + p$$

Keterangan :

$\hat{r}$: Sewa

$\hat{w}$: Upah

$\hat{i}$: Investasi

p : Keuntungan

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di suatu daerah yang digunakan untuk konsumsi akhir atau seluruh komponen permintaan akhir. Yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan inventori, dan
- e. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasinya yang berjudul “PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022”, rumus yang digunakan dalam pendekatan ini adalah:

$$Y = \dot{C} + \bar{G} + I(\dot{X} - \dot{M})$$

Keterangan:

Y : Pendapatan nasional

$\dot{C}$: Konsumsi rumah tangga

$\bar{G}$: Pengeluaran pemerintah

I : Investasi

$\dot{X}$: Ekspor

$\dot{M}$: Impor

Ketiga pendekatan tersebut secara konseptual menciptakan hasil angka yang serupa, dimana jumlah barang dan jasa akhir akan serupa dengan jumlah pengeluaran yang dihasilkan dan juga sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Berdasarkan harga berlaku dan harga konstan (riil), ketiganya ditampilkan. PDRB berdasarkan harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang diperkirakan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan (Badan Pusat Statistik, PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2022).

Badan Pusat Statistik juga menjelaskan kegunaan dari menghitung nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah sebagai berikut:

1. PDRB atas harga berlaku (nominal) menggambarkan kemampuan sumber daya atau kekayaan ekonomi di suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB maka semakin besar juga kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah.
2. PDRB atas harga konstan (riil) menggambarkan kemajuan dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau setiap kategorinya dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha menggambarkan bentuk struktur ekonomi atau kegunaan dari setiap kategori ekonomi di daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai Produk Domestik Bruto dan Produk Neto Bruto per kapita.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan perekonomian per orang penduduk di suatu wilayah secara nyata.

2.1.6 Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang pernah tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan atau kurang dari beberapa bulan dengan tujuan untuk tetap tinggal di wilayah Indonesia.

Menurut Asmuruf, Makdalena F Rumat & Kawung (2015), penduduk adalah seluruh orang yang dibenarkan secara hukum yang berlaku mendiami suatu wilayah atau negara serta menuruti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah dan negara tersebut.

Menurut Oktiani (2021), penduduk merupakan total orang yang bermukim disuatu daerah pada suatu periode tertentu dan sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas demografi yaitu kesuburan, tabiat, dan pergerakan penduduk (migrasi).

Penduduk dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seluruh individu yang telah bertempat tinggal di suatu lokasi tertentu selama jangka waktu tertentu dan telah diverifikasi kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan setempat sebagai akibat dari aktivitas demografi di wilayah tersebut.

Badan Pusat Statistik memiliki kewenangan untuk mencatat data kependudukan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat empat metode yang digunakan untuk menentukan jumlah penduduk:

1. Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) dilakukan setiap sepuluh tahun dengan dua tahap pencacahan, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Dalam pelaksanaannya, pendekatan *de jure* digunakan untuk mereka yang memiliki tempat tinggal tetap, dengan mencatat sesuai dengan tempat tinggal secara resmi. Sementara pendekatan *de facto* diterapkan pada sensus yang dilakukan terhadap mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, dicatat di tempat mereka berada. Kedutaan besar tidak termasuk dalam sensus. Bertujuan untuk menyediakan data dasar yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, kebijakan publik, dan analisis demografis. Data sensus mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan aspek-aspek lain.

2. Survei Penduduk Antar Sensus

Survei penduduk antar sensus merupakan metode perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan diantara dua sensus penduduk (SP). Dilakukan wawancara kepada rumah tangga yang terpilih terkait dengan kondisi-kondisi kependudukan, seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi.

3. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Sejalan dengan survei populasi antarsensus, pengukuran demografi khususnya yang berkaitan dengan kesuburan, keluarga berencana, dan kematian digunakan untuk mengumpulkan data pada survei ini.

4. Registrasi Penduduk

Informasi kependudukan dikumpulkan dari berkas administrasi aparat desa yang diperoleh melalui registrasi kependudukan. Data diperoleh pada tingkat regional dan nasional dengan menjumlahkan seluruh catatan penduduk desa. Kementerian Dalam Negeri menggunakan cara *de jure* dalam melakukan aksi tersebut.

Informasi penduduk yang diperoleh dari sensus, survei, dan data administratif mencerminkan kondisi saat pengumpulan data dilakukan. Meskipun demikian, untuk menyusun rencana dan kebijakan yang sesuai dengan perubahan waktu di masa depan, diperlukan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk ini menjadi penting untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memantau dan mengevaluasi program, mengidentifikasi disparitas dalam implementasi, serta merancang kebijakan lanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang bergantung pada asumsi-asumsi khusus terkait dengan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proses pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut melibatkan analisis data historis, faktor-faktor yang memengaruhi mereka, serta hubungan antar mereka. Penerapan asumsi yang telah ditentukan akan mempengaruhi hasil proyeksi mengenai jumlah dan struktur umur penduduk di

masa yang akan datang. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat proyeksi jumlah penduduk berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) tahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Metode yang digunakan ialah metode komponen kohort dengan pendekatan determinasi. Metode ini bergantung pada asumsi-asumsi tertentu yang terkait dengan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, termasuk kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam penelitian Adiwibowo (2022) rumus dari metode kohort sendiri adalah:

$$\dot{P} = P_0 + (\dot{B} - \dot{D}) + (\dot{M}_i - \dot{M}_o)$$

Keterangan :

$\dot{P}$: Total penduduk

P_0 : Total penduduk pada tahun referensi

$\dot{B} - \dot{D}$: Pertumbuhan alamiah (kelahiran – kematian)

$\dot{M}_i - \dot{M}_o$: Migrasi netto (migrasi masuk – migrasi keluar)

2.1.7 Wisatawan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisatawan didefinisikan sebagai orang yang berwisata dan mendefinisikan wisata sebagai suatu aktivitas kunjungan atau hanya separuh dari aktivitas itu, atas kemauannya sendiri dalam jangka waktu tertentu untuk menikmati objek dan pesona wisata disuatu daerah.

Menurut Tendean dkk, (2017), wisatawan merujuk kepada individu yang melakukan perjalanan atau kunjungan ke suatu wilayah tertentu dengan tujuan melihat pemandangan indah, berbisnis, berpartisipasi dalam aktivitas olahraga, belajar, atau bersantai.

Menurut Sugiarto dkk., (2023), wisatawan merupakan seorang atau sejumlah orang yang melakukan kunjungan ke suatu tempat wisata dan tinggal kurang dari dua belas bulan atau paling sedikit satu hari di tempat wisata tersebut dengan berbagai tujuan mulai dari kebutuhan pekerjaan, keinginan pribadi, atau berwisata.

Menurut uraian di atas, wisatawan adalah orang atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan untuk berlibur, urusan bisnis, atau pribadi dan bermaksud untuk tinggal di sana paling singkat satu hari dan paling lama dua belas bulan.

Ada dua kategori wisatawan dalam publikasi Badan Pusat Statistik tentang Neraca Satelit Pariwisata Nasional (2014) yaitu:

1. Wisatawan Mancanegara

United Nations Statistics Division (UNSD) dan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam publikasi statistik oleh Badan Pusat Statistik yang berjudul “Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021”, mendefinisikan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai suatu individu (orang) yang berkunjung ke suatu daerah di luar asal negara tempatnya tinggal, tidak sampai setahun, dikarenakan adanya suatu tujuan baik itu untuk berlibur, urusan pribadi, atau berbisnis), selain untuk bertugas dengan masyarakat negara yang dikunjungi. Biasanya menghabiskan uang untuk akomodasi, transportasi, belanja, dan layanan lainnya, sehingga memiliki dampak positif pada perekonomian lokal

Definisi diatas juga mengkategorikan pengunjung mancanegara dalam 2 kelas, yaitu:

- a. Wisatawan (*tourist*), sesuai dengan definisi diatas dengan lama tinggal sedikitnya satu hari dan tidak melewati satu tahun di daerah yang didatangi dengan tujuan kedatangan sebagai berikut:
 - 1). Pribadi : liburan, kunjungan keluarga atau teman, pendidikan, kesehatan, agama, olah raga, dan sebagainya.
 - 2). Perjalanan Bisnis : menghadiri pameran bisnis, konferensi, pertunjukan, atau konser, dan sebagainya.
- b. Pelancong (*Excursionist*), sesuai dengan definisi diatas yang tinggal kurang dari satu hari di daerah yang dikunjungi.

2. Wisatawan Nusantara

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Neraca Satelit Pariwisata Nasional (2014) mendefinisikan wisatawan nusantara sebagai orang Indonesia yang berkunjung ke daerah yang masih di wilayah Indonesia karena kemauan sendiri dalam jangka waktu dibawah enam bulan dan tidak dengan niat ingin bekerja serta tidak rutin. Dengan patokan sebagai berikut:

- a. Orang yang berkunjung ke tempat wisata komersial, tanpa memikirkan untuk menginap di penginapan serta lebih kurang 100 km pulang-pergi jaraknya.
- b. Individu yang mengunjungi destinasi wisata membayar dan menginap di fasilitas penginapan membayar, dengan jarak perjalanan kurang dari 100 kilometer dari titik awal perjalanan mereka.
- c. Individu yang melakukan kunjungan ke lokasi wisata non-komersial tanpa menginap di penginapan, meskipun jarak perjalanan mereka melebihi 100 kilometer pergi-pulang.

Dalam Laporan Badan Pusat Statistik yang berjudul Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2020, menjelaskan bahwa metode perhitungan perjalanan wisatawan nusantara menggunakan metode MPD (*Mobile Positioning Data*). *Mobile Positioning Data* (MPD) adalah sekumpulan data yang terstruktur dalam skala besar yang berisi catatan lokasi dan transaksi dari pengguna operator seluler (*Mobile Network Operator/ MNO*) yang diproses dan disimpan didalam suatu sistem. MPD dapat digunakan untuk menghitung kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan cara melihat perpindahan lokasi wisatawan berdasarkan sinyal telepon selulernya, apakah pengguna seluler sedang melakukan perjalanan antar daerah maupun negara. Dengan MPD data yang dihasilkan lebih valid, akurat, dan realtime dalam pendistribusian data untuk menghitung pergerakan wisatawan di Indonesia.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah

Teori pertumbuhan neo klasik yang dikemukakan oleh Abramovitas dan Solow dalam penelitian Susanti (2017) menyatakan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB disuatu daerah, tingginya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat menciptakan masyarakat yang produktif karena terjadi peningkatan pendapatan dan banyaknya variasi produk dan jasa yang diproduksi di suatu daerah sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat daerahnya (Ariyani, 2018). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah menunjukkan bahwa salah satu indikator yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah ialah melalui pajak dan retribusi daerah, dimana objek dari pajak dan retribusi daerah itu sendiri adalah badan atau pribadi yang menetap serta adanya transaksi-transaksi ekonomi di daerahnya. Tujuh belas sektor yang termasuk dalam PDRB merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah seperti sektor perhotelan dapat berkontribusi pada PAD melalui pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak restoran. Kemudian ada sektor manufaktur atau industri melalui pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB, dan sebagainya yang didasarkan oleh peraturan pemerintah. Di sisi lain, tingginya penerimaan pajak dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang memiliki potensi untuk merangsang aktivitas ekonomi dan pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang memperhitungkan kenaikan rata-rata pendapatan pribadi. Kapasitas seseorang untuk memenuhi beberapa kebutuhan keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan pendapatannya (Juliansyah, 2018). Selain itu, industri yang termasuk dalam produk domestik regional bruto (PDRB) telah dikenakan tarif pajak yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, industri-industri ini dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah (Lumy dkk., 2018). Hasil penelitian Hendri dkk., (2021) produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah

Dalam teori perpajakan yang dikemukakan oleh Musgrave dalam penelitian Lumy dkk., (2018), jumlah penduduk menentukan tingkat penerimaan pendapatan pemerintah atas pajak atau dapat dikatakan penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dalam penelitian Lumy dkk., (2018), teori Hansen tentang stagnansi menyatakan peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong permintaan agregatif, terutama dalam investasi. Pertumbuhan cepat penduduk tidak selalu menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Mereka berperan sebagai konsumen dalam permintaan dan sebagai produsen dalam penawaran serta tenaga kerja bagi faktor produksi perusahaan (Dewi dkk., 2018). Jika penduduk memiliki kemampuan tinggi untuk menghasilkan dan menyerap produksi, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak positif pada pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan jumlah wajib pajak untuk pembayaran pajak daerah (Siskawati, 2014).

2.2.3 Hubungan Jumlah Wisatawan Nusantara dengan Pendapatan Asli Daerah

Hotel, restoran, dan objek wisata merupakan salah satu sarana utama bagi wisatawan, sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel dan restoran ini dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat parkir khusus, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel, yang termasuk objek pajak hotel adalah badan atau pribadi atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran mencakup berbagai fasilitas dan layanan pendukung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi tamu. Ini termasuk fasilitas olahraga, hiburan, dan penyewaan ruangan di hotel yang dapat disewa oleh tamu hotel termasuk berbagai fasilitas seperti telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, layanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Sehingga jumlah wisatawan nusantara dapat ikut serta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Dewi dkk, 2018).

2.2.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Jumlah Penduduk

Penduduk sangat berkaitan dengan PDRB, yaitu sebagai penggerak dari semua sektor PDRB. Semakin tinggi jumlah penduduk yang produktif maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa serta terciptanya peluang usaha yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membantu mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Susanto, 2014).

2.2.5 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Jumlah Wisatawan Nusantara

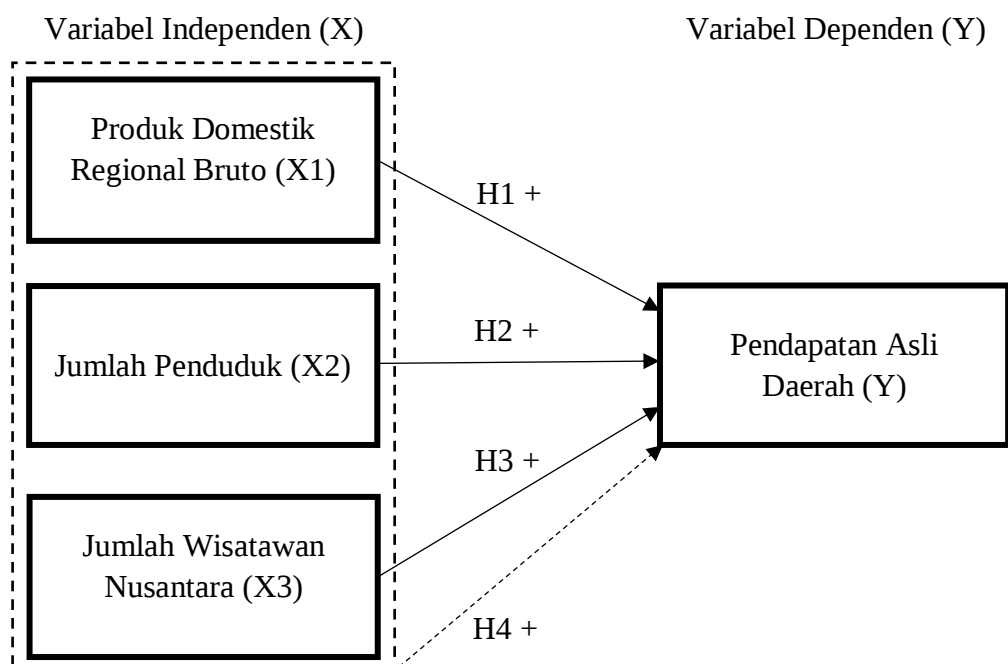
Jumlah wisatawan dapat berdampak langsung pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan, permintaan terhadap barang dan jasa pariwisata meningkat. Ini mencakup pengeluaran untuk akomodasi, makanan, transportasi, belanja, dan aktivitas wisata lainnya. Semakin banyak wisatawan yang mengunjungi suatu wilayah, semakin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah tersebut (Yoga Suastika, 2015).

2.2.6 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Wisatawan Nusantara

Jumlah penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah dapat menciptakan potensi daya tarik wisata yang beragam. Penduduk yang banyak dapat berkontribusi pada keberagaman budaya, tradisi, kuliner, dan kerajinan lokal, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengalami pengalaman budaya yang autentik. Jumlah penduduk yang besar juga dapat menciptakan kegiatan komunitas lokal yang menarik minat wisatawan, seperti festival, pasar tradisional, atau kegiatan seni dan budaya lainnya (Rahmatin, 2023).

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

----- : Berpengaruh secara simultan

————— : Berpengaruh secara parsial

2.4 Hipotesis

2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian Adriani (2018) yang berjudul “Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin” menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi secara signifikan dan menguntungkan atau dipengaruhi secara positif oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hal ini serupa dengan beberapa penelitian lainnya, Batik (2013); Marliyanti & Arka (2014); Susanto (2014); Ariyani dkk., (2018); Juliansyah & Sulkadria (2018); Weley dkk., (2019); Hendri dkk., (2021); dan Priyono & Handayani (2021). Maka dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

H1 : Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian Priyono & Handayani (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018”. Dengan asumsi jumlah penduduk di wilayah penelitian sangat produktif,

Hal ini serupa pada penelitian Susanto (2014); Asmuruf (2015); Hasanur (2017); Hendriyani (2017); Ariyani dkk., (2018); Dewi dkk., (2020); Oktiani (2021); dan Purba & Manurung (2023). Maka jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

H2 : Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.3 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian Maulana (2016) jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tempat wisata akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan atau pengunjung, sehingga meningkatkan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini serupa pada penelitian Marini (2017); Sari & Dewi (2018); Pratiwi (2019); Hanafi Ahmad (2022); dan Anggreni (2023). Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan nusantara berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3 : Diduga Jumlah Wisatawan Nusantara berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.4 Produk Domesik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan Nusantara dan Pendapatan Asli Daerah.

Bedasarkan penelitian Adriani (2018); Weley dkk, (2019); Priyono & Handayani (2021); Susanto (2014); dan Maulana (2016) Produk Domesik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara secara Bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4 : Diduga Produk Domesik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan Nusantara secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Priyono & Handayani, (2021)	“Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018.”	Jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semuanya mempunyai dampak yang kuat dan menguntungkan terhadap pendapatan daerah.
2	Weley dkk., (2019)	“Analisis Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.”	Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dipengaruhi oleh PDRB dan inflasi, terbukti dengan nilai F-hitung sebesar 33,743 melebihi nilai F-tabel sebesar 19,25 dengan signifikan pada tingkat kepercayaan 0,01
3	Dewi dkk., (2018)	“Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.”	Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah hotel, jumlah pengunjung, objek wisata, dan jumlah penduduk sekaligus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4	Adriani, (2018)	“Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin.”	PDRB dan jumlah penduduk memiliki korelasi yang sangat erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan model yang diestimasi dapat dianggap akurat atau PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD.
5	Ariyani dkk., (2018)	Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Menurut Ahyar (2020), penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dengan maksud untuk menciptakan dan memanfaatkan model matematis, teori, dan/atau hipotesis yang terkait dengan suatu fenomena. Minta dkk., (2022) menginterpretasikan analisis dengan jenis data sekunder sebagai penggunaan informasi yang telah diperoleh oleh pihak lain, dengan melakukan analisis statistik dan interpretasi yang berbeda dari penelitian asalnya untuk memperoleh wawasan baru.

Penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang luas dan terperinci yang mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan metode statistik dan teknik analisis kuantitatif yaitu regresi data panel, untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Wisatawan Domestik) dan variabel dependen (PAD).

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber seperti publikasi, profil, buku panduan, atau literatur yang disediakan oleh individu atau lembaga lain (Ahyar dkk., 2020). Dalam penelitian ini data diperoleh dari instansi yang melakukan pendataan atau statistik di Republik Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs resminya *www.bps.co.id* yang diakses pada tahun

2023, Kementrian Keuangan (DJPK), PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), serta laporan keuangan tahunan tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dengan data-data yang digunakan:

1. PDRB, yaitu PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan
2. Jumlah Penduduk, yaitu hasil proyeksi penduduk yang didasarkan dari sensus penduduk tahun 2020
3. Jumlah Wisatawan Nusantara
4. Pendapatan Asli Daerah

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan data yang digunakan merupakan data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan dokumentasi terhadap publikasi atau laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang terkait melalui situs (*website*) dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Metode dokumentasi merujuk pada cara atau proses pengumpulan data dengan mencatat informasi yang sudah ada, baik itu dalam bentuk tertulis, visual, publikasi, dan *website* atau elektronik (Ahyyar dkk., 2020).

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sahir (2021) populasi merupakan seluruh objek yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Total Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ada 23 yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten

Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota.Langsa, dan Kota Subulussalam.

3.4.2 Sampel

Menurut Sahir (2021), sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk tujuan penelitian. Sampel penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Rumus atau Metode	Skala
1	Produk Domestik Regional Bruto (X1)	Total nilai tambah bruto dari seluruh produk dan jasa, serta unit usaha yang diciptakan di suatu wilayah domestik sebagai akibat dari berbagai kegiatan ekonomi dalam jangka waktu tertentu. (BPS, 2023)	a Pendekatan Produksi $Y = NTB1 + NTB2 + \dots$ b Pendekatan Pendapatan $Y = \hat{r} + \hat{w} + \hat{i} + p$ c Pendekatan Pengeluaran $Y = \hat{C} + \hat{G} + \hat{I} (\hat{X}-\hat{M})$ (BPS, 2023)	Jumlah (Satuan rupiah)
2	Jumlah Penduduk (X2)	Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan atau lebih, atau jangka waktu yang lebih pendek dengan tujuan menetap secara tetap, disebut penduduk. (BPS,2023)	Metode kohort dengan rumus: $\hat{P} = P0 + (\hat{B} - \hat{D}) + (\hat{M}_i - \hat{M}_o)$ (Adiwibowo & Karyana, 2022)	Jumlah (Satuan jiwa)
3	Jumlah Wisatawan Nusantara (X3)	Warga Indonesia yang mengunjungi wilayah domestik lainnya dengan keinginan sendiri, dalam	MPD (<i>Mobile Positioning Data</i>), yaitu dengan melihat	Jumlah (Satuan jiwa)

No	Variabel	Definisi Variabel	Rumus atau Metode	Skala
		jangka waktu kurang dari enam bulan, tanpa maksud untuk bekerja secara reguler (BPS, 2023).	pergerakan masyarakat melalui sinyal seluler. (BPS, 2023)	
4	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Semua pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah dalam bentuk kas yang menambah kekayaan bersih suatu daerah pada jangka waktu tertentu dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan (Idris, 2016).	PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain- lain PAD yang sah. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)	Jumlah (Satuan rupiah)

3.6 Teknik Pengelolaan Data

Menggunakan program E-views. E-views merupakan perangkat lunak atau program yang dirancang untuk melakukan komputasi statistik yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Program ini menyediakan fasilitas perhitungan, peramalan, statistik, dan pemodelan dengan antarmuka yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pengguna dari berbagai latar belakang (Hidayat & Sadewa, 2020). Alasan program ini digunakan pada penelitian ini dikarenakan E-views lebih khusus digunakan dalam bidang ekonomi dan keuangan, fokus utama E-views adalah pada analisis data ekonomi, peramalan, estimasi model ekonometrik, dan analisis deret waktu.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Metode Analisis Data

3.7.1.1 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Madany (2022), Analisis regresi data panel merupakan kombinasi antara data deret waktu (*time series*) dan data lintas sektoral (*cross section*). Regresi

data panel digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Data dalam analisis ini dikumpulkan secara simultan pada berbagai unit pengamatan, yang disebut sebagai data lintas individu. Seiring dengan itu, data juga dikumpulkan dari waktu ke waktu.

Menurut Basuki & Prawoto (2019), model regresi data panel umumnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + \dots + b_nX_{nit} + e_{it}$$

Berdasarkan rumus diatas, Y_{it} mencerminkan variabel terikat, X_{it} mencerminkan variabel bebas, i merepresentasikan individu ke- i , t merepresentasikan periode ke- t , dan E_{it} mencerminkan kesalahan *cross-section* pada individu ke- i dan waktu ke- t .

Model regresi data panel pada penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y : Variabel terikat (PAD)

α : Konstanta

X_1 : Variabel bebas 1 (PDRB)

X_2 : Variabel bebas 2 (Jumlah Penduduk)

X_3 : Variabel bebas 3 (Jumlah Wisatawan Nusantara)

$B_{(1,2,...)}$: Koefisien regresi untuk setiap variabel bebas

E : *Error term*

i : Kabupaten/Kota (Provinsi Aceh)

t : Waktu (2020-2022)

3.7.1.2 Model Regresi Data Panel

1. *Common Effect Model (CEM)*

Menurut Amaliah (2020), Dalam model *Common Effect* (CEM), semua data digabungkan tanpa memperhatikan dimensi waktu (*time series*) dan individu (*cross section*), menghasilkan satu set data yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Oleh karena itu, model ini mirip dengan model regresi linear konvensional.

Menurut Amaliah (2020), rumus model untuk *Common Effect Model* (CEM) dinyatakan dalam persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + x_{it}\beta + \varepsilon_{it}; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana:

Y_{it} = nilai variabel dependen unit cross section ke- i untuk periode ke- t

β_0 = intersep atau konstanta unit cross section

x_{it} = [x_{1it} x_{2it} ... x_{kit}] vektor variabel independen berukuran (1 x k)

β = [β_1 β_2 ... β_k] vektor *slope* atau koefisien regresi sebanyak k variabel independen berukuran (k x 1)

ε_i = galat regresi unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t ; $\varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma_{2\varepsilon})$.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Menurut Amaliah (2020), Satu metode untuk mengakomodasi heterogenitas unit *cross-section* dalam model regresi data panel adalah dengan membedakan nilai intersep sementara *slope* tetap. Model ini dikenal sebagai *Fixed Effect Model* (FEM).

Rumusnya dijelaskan dalam suatu persamaan:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + x_{it} \beta + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : nilai variabel dependen unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

β_{0i} : intersep atau konstanta unit *cross section* ke- i

x_{it} : [$x_{1it} x_{2it} \dots x_{kit}$] vektor variabel independen berukuran ($1 \times k$)

β : [$\beta_1 \beta_2 \dots \beta_k$] vektor *slope* atau koefisien regresi sebanyak k variabel independen berukuran ($k \times 1$)

ε_{it} : galat regresi unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t ; $\varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon}^2)$

3. *Random Effect Model (REM)*

Menurut Amaliah (2020), merupakan model regresi data panel yang mengestimasi variabel gangguan yang saling memiliki hubungan time series dan cross section. Parameter-parameter yang berbeda antar individu dan antar waktu dimasukkan ke dalam *error* sehingga model ini juga disebut sebagai model komponen *error* atau *error component model*. Pendekatan dengan model *random effect* (REM) diasumsikan β_{0i} merupakan variabel *random* dengan mean β_0 dan variansi $\sigma_{\varepsilon 2}$. Sehingga intersep ditunjukkan pada persamaan.

$$\beta_{0i} = \beta_0 + \varepsilon_i ; \varepsilon_i \sim N_{iid}(0, \sigma_{\varepsilon 2})$$

Dengan ε_i merupakan galat *random* yang mempunyai mean 0 dan variansi $\sigma_{\varepsilon 2}$. Model efek acak dapat diestimasi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS) sebab jika diestimasi dengan OLS hasil estimasi tidak efisien. Secara umum persamaan model efek acak ditunjukkan pada persamaan.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + x_{it}\beta + w_{it}$$

Dimana w_{it} ditunjukkan pada persamaan:

$$w_{it} = \varepsilon_i + u_{it}; w_{it} \sim N_{iid}(0, \sigma_w^2)$$

Nilai w_{it} mengandung galat untuk data *cross section* (ε_i) dan untuk data berkala (u_{it}) dengan asumsi bersifat *independent and identically distributed* (IID) normal dengan *mean* 0 dan variansi σ_w^2 .

3.7.2 Uji Pemilihan Model

3.7.2.1 Uji Chow

Menurut Sihombing (2018), untuk mencari tahu apakah model yang digunakan adalah efek tetap (*fixed*) atau efek umum (*common*) adalah tujuan dari uji Chow. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut ini:

1. Jika probabilitas < 0.05 , model *fixed effect* yang sesuai.
2. Jika probabilitas > 0.05 , model *common effect* yang sesuai.

Statistik Chow yang dihitung (F-statistik), yang akan mengikuti distribusi F dengan $n-1$ derajat kebebasan (df) di pembilangnya, digunakan untuk membenarkan penolakan hipotesis nol. Metodologi regresi data panel yang menggunakan CEM dianggap lebih unggul dibandingkan metode FEM jika nilai F tabel lebih besar dari nilai F hitung.

3.7.2.2 Uji Hausman

Menurut Sihombing (2018), uji hausman adalah suatu uji statistik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model terbaik antara model *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika probabilitas < 0.05 model *fixed effect* yang sesuai.
2. Jika probabilitas > 0.05 model *random effect* yang sesuai

Alasan penolakan melibatkan penggunaan statistik hausman dan membandingkannya dengan nilai kritis *chi-square*. Jika hasil uji hausman lebih besar daripada nilai yang tertera pada tabel (nilai kritis statistik dari *chi-square*), maka estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect*, dan sebaliknya.

3.7.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Sihombing (2018), uji Lagrange Multiplier adalah suatu metode pengujian untuk menentukan apakah model yang digunakan adalah *common effect model* atau *random effect model*. Uji ini dilakukan dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika probabilitas > 0.05 model *common effect* yang sesuai.
2. Jika probabilitas < 0.05 model *random effect* yang sesuai

Uji Lagrange Multiplier ini bersandar pada probabilitas *Breusch-Pagan*. Jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan* berada di bawah nilai alpha, maka model yang tepat untuk estimasi regresi data panel adalah model *random effect*, dan sebaliknya jika nilainya lebih tinggi.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut Sahir (2021), uji normalitas dipakai untuk menilai apakah distribusi variabel independen dan variabel dependen bersifat normal atau tidak. Untuk mengevaluasi apakah residu memiliki distribusi normal, kita dapat

menggunakan uji *Jarque-Bera*. Uji *Jarque-Bera* adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah data memiliki distribusi normal, dan umumnya cocok digunakan untuk ukuran sampel yang besar (Hamid, 2020).

Kriteria yang digunakan untuk membuat suatu kesimpulan setelah dilakukan uji adalah:

1. Jika nilai signifikansi atau probabilitas lebih besar dari 0,05, hipotesis diterima karena menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.
2. Jika nilai signifikansi atau probabilitas kurang dari 0,05, hipotesis ditolak karena menandakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.

3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2017), Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah ada ketidaksetaraan varians dari residu antara satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi. Apabila varians dari residu tetap konstan dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas dan sebaliknya akan disebut heteroskedastisitas. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *White*, dilakukan regresi dari masing-masing variabel independen dengan menggunakan nilai absolut residu sebagai variabel yang memengaruhi.

Kriteria pengambilan kesimpulannya adalah:

1. Tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05.
2. Adanya tanda-tanda gejala heteroskedastisitas jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

3.7.3.3 Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno (2014), Autokorelasi adalah kondisi di mana terdapat korelasi antara residu dalam suatu observasi dan observasi lain dalam model regresi. Pengujian autokorelasi biasanya diperlukan pada data time series (data deret waktu), sedangkan pada data ordinal atau interval, pengujian autokorelasi tidak diwajibkan (Sahir, 2021).

Kriteria yang digunakan untuk membuat suatu kesimpulan setelah dilakukan uji adalah:

1. Terdapat autokorelasi, jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$
2. Tidak terdapat autokorelasi, jika $dU < DW < 4 - dU$
3. Tidak memberikan kesimpulan yang pasti (inconclusive), jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$

3.7.3.4 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam suatu model regresi berkorelasi. Tidak boleh ada hubungan apapun antar variabel independen di dalam model regresi yang baik (Widarjono, 2018). Variabel independen tidak ortogonal jika menunjukkan korelasi satu sama lain. Menurut Harahap (2017), kriteria berikut dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi:

1. Terjadi multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi (R^2) kurang dari 0,90.
2. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai koefisien korelasi (R^2) kurang dari 0,90.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Parsial (*T-test*)

Menurut Widiaworo (2019), penelitian dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%, maka uji parsial digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara terpisah.

Kriterianya adalah terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk tingkat signifikasinya, jika nilai t untuk tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen dan dependen berpengaruh, begitu pula sebaliknya.

3.7.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Hartono (2019), uji f adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Widiaworo (2019), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen dalam model mempunyai pengaruh gabungan terhadap variabel dependen digunakan uji simultan. Membandingkan nilai F yang dihitung dengan nilai F tabel, dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel begitu pula sebaliknya. Selanjutnya untuk menilai signifikansinya, dapat dikatakan ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat jika nilai F kurang dari 5% (0,05), begitu pula sebaliknya.

3.7.4.3 Koefisien Determinasi (Nilai R^2)

Menurut Widiaworo (2019), Kisaran nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1, dengan $0 < R^2 < 1$. Peningkatan nilai R^2 menunjukkan persamaan regresi yang lebih kuat bila model regresi digunakan dan dihitung dengan benar. Dengan kata lain, variabel kriteria yang dihasilkan model mempunyai potensi prediksi yang semakin kuat jika semakin tinggi nilai R^2 .

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, F., & Karyana, Y. (2022). Proyeksi Penduduk Indonesia dengan Menggunakan Metode Campuran. *Bandung Conference Series: Statistics*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.29313/bcss.v2i1.124>
- Adriani, E. (2018). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cetakan 1). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Anggreni, N. W., & Budiasih, N. G. A. N. (2023). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun 2019-2022. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v4i1.82>
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.015>
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>
- Asmuruf, Makdalena F Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 156–173.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018-2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2023). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>

- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2023). Jumlah Penduduk di Provinsi Indonesia. <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). <https://www.bps.co.id>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022). Kabupaten Badung dalam Angka 2021.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam Angka 2021-2023.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://doi.org/9302019>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2020). Statistik Wisatawan Nusantara 2020.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh 2019-2022.
- Basuki, T., & Prawoto, N. (2019). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Cetakan 3). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 125. <https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3735>
- Dewi, D. L., Indrawati, L. R., Septiani, Y., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. *Journal of Economic*, 2(3), 647–658.
- Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2023). Realisasi APBD Pemerintah Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Eka Nur Amaliah, Darnah, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM). *Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106–115.
- Eni Erviana. (2018). Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 1–131.

- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ghozali, I., & Dwi, R. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan Eviews 10* (Edisi 1, C). Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory. *Semnas Fekon*, 50–57.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbali, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10*. (Cetakan 1). Kota Serang - Banten: CV. AA Rizky.
- Hanafi Ahmad, A. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.34>
- Harahap, R. U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara. *KITABAH*, 1(1).
- Hasanur, D., & Putra, Z. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Kawasan Barat Selatan Aceh). *E-KOMBIS*, 3(2), 46–59.
- Hendri Saldi, A., Zulgani, Z., & Nurhayani, N. (2021). Analisis pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 201–210. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16260>
- Hendriyani, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada DPPKAD, BAPPEDA, Dan BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2015). 1–14.
- Hidayat, A., & Sadewa, P. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Eviews Terhadap Sikap Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah Statistik. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 321–328. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.253>
- Horota, P. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10.

- Hutasoit, N. (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Jumlah Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Sub Sektor PDRB Industri Pariwisata Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2013. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 647–661.
- Idris, I. F. (2016). Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. *European Journal Of Accounting* 4.1, 4(1), 28–42.
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(02), 58–64.
- Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1750>
- Kementrian Pariwisata RI. (2014). Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS). Jakarta: Pusat Data & Informasi.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., & Ratulangi. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16.
- Marini, Y. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2015. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i2.42>
- Marliyanti, D. S., & Arka, S. (2014). Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 3 (6)(2012), 265–271.
- Maulana, A. (2016). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Perjalanan Wisatawan Nusantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 11(1), 119–144.
- Minta, S., Suriani, & Meutia, R. (2022). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Masyarakat di Provinsi Aceh dengan Regresi Data Panel. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1577>
- Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 16–35.

- Patriansyah, A. R. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, UMR, PDRB dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2011 - 2016. 5–24.
- Pratiwi, A. C. (2019). Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018. *Jurnal Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan*, 4, 2–3.
- Priyatno, D. (2014). *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1–10.
- Purba, E., & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–8.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v5i1.493>
- Purnomo & Sutadji, E. (2022). *Analisis Data Multivariat* (Cetakan 1). Malang: Omera Pustaka.
- Rafi, M., Anwar, H. S., & Malik, I. (2022). Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 di Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4129–4138.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12, 1.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 22, 1.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pub. L. No. 25, 1.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pub. L. No. 10, 1.
- Republik Indonesia. (2014). Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 10, 25.

Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Reni Ria Armayani Hasibuan, Anggi Kartika, Firdha Aigha Suwito, L. A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 685-693. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.887>

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (Cetakan I). Banguntapan, Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia.

Sari, D. ayu novita, & Dewi, M. heny urmila. (2018). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(1), 389–418.

Sihombing, P. R. (2018). *Statistik Multivariat Dalam Riset*. Jakarta: Widina.

Silaban, P. H., & Silalahi, A. D. K. (2020). Kepuasan Wisatawan Pada Destinasi Wisata Danau Toba. Jawa Tengah: CV. Pena Persada. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>

Siskawati, N. (2014). Pegaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 9(2), 197–206.

Sugiarto, A., Manalu, S. P. R., & Pakpahan, E. (2023). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Pajak Restoran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. *Jesya*, 6(1), 221–232. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.903>

Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah*, 1–16.

Syechalad, M. N., & Susanti, H. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4, 1–12.

Tendean, J. C., Palar, S. W., & Tolosang, K. D. (2017). Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Melalui

Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 14(3), 1–15.

Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198>

Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 105–128.

Weley, I. R., Kumenaung, A. G., & Sumual, J. I. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–10. <https://doi.org/10.35794/jpek.16457.19.3.2017>

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widiasworo, E. (2019). *Menyusun Penelitian Kuantitatif untuk Skripsi dan Tesis*. (Ilalang, Ed.) (Cetakan I). Yogyakarta: Araska.

Yanti, N. N. L. A., Aziz, I. S. A., & Wulandari, I. G. A. A. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Lamanya Menginap Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar Tahun 2011-2019. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4(2), 60–67. <https://doi.org/10.22225/wedj.4.2.2021.60-67>

Yoga Suastika, I. G., & YasaI, Mahendra, I. N. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(7), 1332–1363.

Curriculum Vitae



A. INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap : Haiqal Imansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir : Kota Tanjungpinang, 09 Oktober 2000
Warga Negara : Indonesia
Umur : 23 Tahun
Alamat : Hanglekir, Batu IX
Agama : Islam
Email : haiqalcs88@gmail.com
Nomor HP : 089512539458

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD	SDN 006 Tanjungpinang	2012
SMP	SMPN 7 Tanjungpinang	2015
SMA	SMKN 1 Tanjungpinang	2018
Universitas	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2023